



PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Telp (022) 7320048B A N D U N G

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat telah selesai disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 tersebut, merupakan salah satu bagian dari dokumen rencana yang diwajibkan untuk disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, program-program yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan rincian kegiatannya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan indikator kinerja dan pencapaian kinerja.

Pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dispusipda Provinsi Jawa Barat tahun 2023, yang telah memberikan waktu, pikiran dan tenaga sehingga Renja ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan, dan semoga dokumen Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



Dra. Hj. I GUSTI AGUNG KIM FAJAR WIYATI OKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196804041988032014

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DEGAN TRIWULAN II Tahun 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II	5
2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat	21
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DISPUSIPDA	
3.1 Tujuan dan Sasaran Dispusipda.....	40
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023..	42
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
BAB V : PENUTUP	48

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (selanjutnya disebut Perubahan Renja) perangkat daerah pada prinsipnya merupakan dokumen perencanaan yang berisikan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Perubahan 2018-2023) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja/RKT).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (Dispupda) sebagai Perangkat Daerah Provinsi memiliki kewajiban untuk menyusun renja sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyelenggaraan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Namun dalam pelaksanaannya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat memandang perlu adanya perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan Perubahan Renja Tahun 2023, yaitu:

1. Ditetapkannya Peraturan Gubernur nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
2. Penyesuaian target indikator capaian kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023;
3. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan sebelumnya sehingga diperlukan pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran kegiatan perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target

kinerja kegiatan serta manfaat atau hasil dari pada kegiatan; dan

4. Hasil Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2023.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan Perubahan Renja Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung ketercapaian sasaran Mutu Pendidikan dan Reformasi Birokrasi di Jawa Barat yang memiliki kewajiban menyusun dokumen Perubahan Renja Tahun 2023 dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang merefleksikan adanya perkembangan isu-isu Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan

1.2. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- c) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- k) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- l) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023;
- m) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan 2018-2023;
- n) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- o) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- p) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- q) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- r) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- s) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- t) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- u) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- v) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
- w) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
- x) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;

- y) Peraturan Gubernur Jabar Nomor 38 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jabar tahun 2022;
- z) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- aa) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud penyusunan Dokumen Perubahan rencana kerja (Renja) adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yang secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023.

1.3.2. Tujuannya adalah:

1. Mewujudkan tertib sistem perencanaan pembangunan daerah;
2. Menciptakan perencanaan yang konsisten dan sinergis;
3. Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Landasan Hukum
1.3.	Maksud dan Tujuan
1.4.	Sitematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DISPUSIPDA PROVINSI JAWA BARAT
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun 2023)
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
- 3.3. Program dan Kegiatan Perubahan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DISPUSIPDA

Pelaksanaan evaluasi berperan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah guna mengetahui capaian program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan untuk kemudian mengidentifikasi beberapa hal berikut:

- 1) Faktor-faktor yang mendorong ketercapaian atau ketidaktercapaian target kinerja program/kegiatan/subkegiatan;
- 2) Dampak yang ditimbulkan atas ketercapaian maupun ketidaktercapaian tersebut;
- 3) Kebijakan ataupun tindakan terkait perencanaan maupun penganggaran yang perlu diambil guna mengatasi dampak-dampak tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun 2023)

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat mengacu kepada Renstra Perubahan Tahun 2018 – 2023. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut disusunlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 yang menetapkan 5 (lima) Program, 17 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran menjadi Rp. 54.798.043.243 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat berperan sebagai perangkat daerah yang mendukung dalam mutu Pendidikan di Jawa Barat. Adapun indikator utama mendukung pada Harapan Lama Sekolah dimana tertuang dalam Perubahan Renstra DISPUSIPDA tahun 2018 – 2023.

Sepanjang tahun 2022 dan triwulan II tahun 2023 kebutuhan penguatan system Pendidikan, layanan kesehatan, dan pemulihan ekonomi yang berdampak terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terjadi. Keadaan tersebut memunculkan beberapa tantangan pembangunan di Jawa Barat dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap postur anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat sehingga membuat terjadinya realokasi anggaran yang disebabkan adanya efisiensi pada beberapa komponen belanja kegiatan.

Secara umum, pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat menunjukkan

upaya dalam pencapaian yang baik. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 sudah berjalan sebagaimana mestinya. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 untuk lebih akurasi terhadap koordinasi dan informasi upaya deteksi dini berbagai permasalahan maka perlu menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran yang diharapkan.

Hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 menunjukkan angka capaian pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 49,11%, Program Pembinaan Perpustakaan sebesar 72,26%, Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno sebesar 12,69%, Program Pengelolaan Arsip sebesar 67,48%, sedangkan pada Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip sebesar 49,11% dari target yang telah ditentukan, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Pencapaian Renstra Dispupipda s.d. Tahun 2022 (Tahun Berjalan) Dispupipda Provinsi Jawa Barat

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.							
	K	Rp.	K	Murni Rp.	Perubahan Rp.	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																	
1	2		3			4		5		6		7		8=4+5+6+7		9=8/3*100		10		11		12	13							
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Membaca	55	2,106,472,048	55	2,106,472,048	2,047,225,348	0	598,985,300	0	1,479,425,978					0	1,479,425,978	0	72.26	0	1,479,425,978	0.00	70.23	PDPBP								
Tingkat Pemanfaatan Bahan Bacaan	71		71			0		0		0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Tingkat Kebiasaan Membaca	66		66			0		0		0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Koleksi Perpustakaan	190	1,928,842,123	899	1,928,842,123	1,891,950,523	0	538,610,382	0	1,358,794,485					0	1,358,794,485	0	71.82	0	1,358,794,485	0.00	70.45	PDPBP								
Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	27	250,993,000	27	250,993,000	260,990,400	3	153,620,773	7	195,620,273					10	195,620,273	37.04	74.95	10	195,620,273	37.04	77.94	PPK								
Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200	147,434,475	200	147,434,475	150,134,025	132	61,094,838	251	99,298,838					383	99,298,838	191.50	66.14	383	99,298,838	191.50	67.35	BPBGM								
Center Of Excellent (telaah Pustaka)	1	12,228,000	1	12,228,000	12,228,000	0	2,192,500	1	8,902,800					1	8,902,800	100.00	72.81	1	8,902,800	100.00	72.81	PDPBP								
Buku/Bahan Perpustakaan Digital Koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat (CANDIL)	3798/7596	1,518,186,648	5478/10956	1,518,186,648	1,468,598,098	1021/2024	321,702,271	2779/5558	1,054,972,574					2779/5558	1,054,972,574	50.73/50.73	71.84	2779/5558	1,054,972,574	73.17/73.17	69.49	PDPBP								
Buku/Bahan Perpustakaan Koleksi Kotak Literasi Cerdas (KOLECER)	3080/6160		3280/6560			638/1276		2442/4414		2442/4414	0	2442/4414	74.45/67.28	2442/4414		79.28/71.65		PDPBP												
Buku/Bahan Perpustakaan Koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat	75/300		71/284			0		0		0	0	0	0.00	0		0.00		PDPBP												
Jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat provinsi	5	177,629,925	4	177,629,925	225,229,825	1	60,374,918	0	120,631,493					1	120,631,493	25.00	53.56	1	120,631,493	20.00	67.91	BPBGM								
1. Aktualisasi Literasi /Festival Literasi	500 20 1 200	104,129,975	500 20 1 200	104,129,975	154,429,875	0 0 0 0	14,060,000	0 5 0 200	60,566,575	0 5 0 200	0 5 0 200	0 5 0 200	0 5 0 200	0 5 0 200	0 5 0 200	0 5 0 200	39.22	0 5 0 200	0 5 0 200	0 25 0 100	58.16	BPBGM								
2. Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus																														
3. Pengembangan Organisasi Masyarakat Perpustakaan																														
4. Workshop Pembudayaan Kegemaran Membaca																														
Jumlah peserta duta baca terpilih	54	73,499,950	54	73,499,950	70,799,950	54	46,314,918	0	60,064,918					54	60,064,918	100.00	84.84	54	60,064,918	100.00	81.72	BPBGM								
Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	23	85,683,000	23	85,683,000	85,683,000	0	10,871,887	0	10,871,887					0	10,871,887	0.00	12.69	0	10,871,887	0.00	12.69	PDPBP								
Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	5324	11,423,000	4500	11,423,000	11,423,000	827	8,596,887	0	8,596,887					827	8,596,887	18.38	75.26	827	8,596,887	15.53	75.26	PDPBP								
Buku/Bahan Perpustakaan hasil implementasi KCKR	5324	11,423,000	4500	11,423,000	11,423,000	786	8,596,887	475	8,596,887					1261	8,596,887	28.02	75.26	1261	8,596,887	23.69	75.26	PDPBP								
Jumlah Judul yang tercantum pada Bibliografi Daerah	45	15,040,000	3800	15,040,000	15,040,000	0	-	0	-					0	-	0.00	-	0	-	0.00	0.00	PDPBP								
Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	38	15,040,000	1	15,040,000	15,040,000	0	-	0	-					0	-	0.00	-	0	-	0.00	0.00	PDPBP								

Jumlah naskah kuno yang dialih medikan dan diterjemahkan	4	44,200,000	1	44,200,000	44,200,000	0	2,275,000	0	2,275,000				0	2,275,000	0.00	5.15	0	2,275,000	0.00	5.15	PDPBP
1. Hasil pengembangan, pengolahan dan pengalihmedaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	2	44,200,000	2	44,200,000	44,200,000	0	2,275,000	0	2,275,000				0	2,275,000	0	5.15	0	2,275,000	0	5.15	PDPBP
2. Naskah kuno hasil terjemahan	2		2			0		0					0		0		0		0		
Jumlah Koleksi Etnis Budaya Nusantara	25	15,020,000	25	15,020,000	15,020,000	0	-	0	-				0	-	0.00	-	0	-	0.00	0.00	PDPBP
Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	25	15,020,000	36	15,020,000	15,020,000	0	-	0	-				0	-	0.00	-	0	-	0.00	0.00	PDPBP
Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) pasal 40 dan 59 UU nomor 43 tahun 2009 ttg kearsipan	45	677,232,348	45	677,232,348	702,297,348	0	202,011,130	0	473,900,931				0	473,900,931	0.00	67.48	0	473,900,931	0.00	69.98	PAD
Terkelolanya Penciptaan, Penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis	125	372,353,248	250	372,353,248	387,353,248	60	94,414,000	60	215,911,282				120	215,911,282	48.00	55.74	120	215,911,282	96.00	57.99	PAD
Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	125	233,849,248	125	233,849,248	239,648,848	30	65,837,800	30	127,693,882				60	127,693,882	48.00	53.28	60	127,693,882	48.00	54.61	PAD
Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	67	138,504,000	125	138,504,000	147,704,400	30	28,576,200	30	88,217,400				60	88,217,400	48.00	59.73	60	88,217,400	89.55	63.69	PAD
Jumlah arsip statis yang dikelola	10	204,879,100	10	204,879,100	214,944,100	4	72,793,140	6	195,930,659				10	195,930,659	100.00	91.15	10	195,930,659	100.00	95.63	PAS
Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preseransi dan Akses	20	204,879,100	10	204,879,100	214,944,100	4	72,793,140	6	195,930,659				10	195,930,659	100.00	91.15	10	195,930,659	50.00	95.63	PAS
Jumlah simpul jaringan yang dikelola	9	100,000,000	9	100,000,000	100,000,000	2	34,803,990	3	62,058,990				5	62,058,990	55.56	62.06	5	62,058,990	55.56	62.06	PPK
Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	27	38,521,000	27	38,521,000	38,521,000	5	14,992,990	4	26,302,990				9	26,302,990	33.33	68.28	9	26,302,990	33.33	68.28	PPK
Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	30	61,479,000	30	61,479,000	61,479,000	3	19,811,000	6	35,756,000				9	35,756,000	30.00	58.16	9	35,756,000	30.00	58.16	PPK
Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	70	121,119,700	70	121,119,700	121,119,700	0	-	0	-				0	-	0.00	-	0	-	0.00	0.00	PAS
Jumlah rekomendasi arsip statis yang di autentikasi dan hasil alih media	10	121,119,700	10	121,119,700	121,119,700	0	-	0	-				0	-	0.00	-	0	-	0.00	0.00	PAS
Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10	121,119,700	10	121,119,700	121,119,700	0	-	0	-				0	-	0.00	-	0	-	0.00	0.00	PAS
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	54,076,926,416	A	54,076,926,416	51,771,762,847	0	11,786,782,117	0	25,426,695,628				0	25,426,695,628	0.00	49.11	0	25,426,695,628	0.00	47.02	Sekretariat
Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	12	250,771,606	14	250,771,606	265,763,856	5	58,045,875	3	127,268,775				8	127,268,775	57.14	47.89	8	127,268,775	66.67	50.75	Sekretariat
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	250,771,606	14	250,771,606	265,763,856	4	58,045,875	3	127,268,775				7	127,268,775	50.00	47.89	7	127,268,775	58.33	50.75	Sekretariat
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	11	40,696,018,308	16	40,696,018,308	38,487,318,920	4	9,674,390,602	4	21,151,586,954				8	21,151,586,954	50.00	54.96	8	21,151,586,954	72.73	51.97	Sekretariat
Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	140	40,596,019,308	140	40,596,019,308	38,377,319,920	145	9,674,390,602	145	21,091,777,954				290	21,091,777,954	207.14	54.96	290	21,091,777,954	207.14	51.96	Sekretariat
Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan	2	99,999,000	16	99,999,000	109,999,000	5	23,801,000	4	59,809,000				9	59,809,000	56.25	54.37	9	59,809,000	450.00	59.81	Sekretariat

Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	140	30,000,000	20	30,000,000	30,000,000	19	6,718,700	26	19,606,600					45	19,606,600	225.00	65.36	45	19,606,600	32.14	65.36	Sekretariat
Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	30	30,000,000	20	30,000,000	30,000,000	19	6,718,700	26	19,606,600					45	19,606,600	225.00	65.36	45	19,606,600	150.00	65.36	Sekretariat
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	1,515,961,833	12	1,515,961,833	1,813,571,436	3	356,465,236	3	806,613,739					6	806,613,739	50.00	44.48	6	806,613,739	50.00	53.21	Sekretariat
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	145,695,230	4	145,695,230	145,695,230	1	36,415,215	1	72,839,865					2	72,839,865	50.00	49.99	2	72,839,865	16.67	49.99	Sekretariat
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	320,050,800	4	320,050,800	439,461,066	1	55,066,989	1	199,983,676					2	199,983,676	50.00	45.51	2	199,983,676	16.67	62.48	Sekretariat
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13	111,686,083	4	111,686,083	151,057,140	1	27,598,196	1	57,753,480					2	57,753,480	50.00	38.23	2	57,753,480	15.38	51.71	Sekretariat
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	37,800,000	12	37,800,000	37,800,000	3	4,657,500	3	13,812,600					6	13,812,600	50.00	36.54	6	13,812,600	50.00	36.54	Sekretariat
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	900,729,720	12	900,729,720	1,039,558,000	3	232,727,336	3	462,224,118					6	462,224,118	50.00	44.46	6	462,224,118	50.00	51.32	Sekretariat
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	155	4,016,620,240	155	4,016,620,240	3,359,431,312	0	-	1	49,900,000					1	49,900,000	0.65	1.49	1	49,900,000	0.65	1.24	Sekretariat
Sofa	10	-	5	-	67,852,010	0	-	1	-					1	-	20.00	-	1	-	10.00	0.00	Sekretariat
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	154	1,118,000,180	154	1,118,000,180	2,305,284,123	0	-	1	49,900,000					1	49,900,000	0.65	2.16	1	49,900,000	0.65	4.46	Sekretariat
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	2,898,620,060	1	2,898,620,060	986,295,179	0	-	0	-					0	-	0.00	-	0	-	0.00	0.00	Sekretariat
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	6,464,911,628	12	6,464,911,628	6,576,901,570	3	1,524,372,129	3	2,758,958,608					6	2,758,958,608	50.00	41.95	6	2,758,958,608	50.00	42.68	Sekretariat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1,089,905,600	12	1,089,905,600	896,967,800	3	230,339,527	3	437,162,592					6	437,162,592	50.00	48.74	6	437,162,592	50.00	40.11	Sekretariat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5,375,006,028	12	5,375,006,028	5,679,933,770	3	1,294,032,602	3	2,321,796,016					6	2,321,796,016	50.00	40.88	6	2,321,796,016	50.00	43.20	Sekretariat
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166	1,102,642,801	155	1,102,642,801	1,238,775,753	49	166,789,575	66	512,760,952					115	512,760,952	74.19	41.39	115	512,760,952	69.28	46.50	Sekretariat
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57	348,039,431	46	348,039,431	414,739,431	21	99,097,545	9	172,422,778					30	172,422,778	65.22	41.57	30	172,422,778	52.63	49.54	Sekretariat
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107	620,747,585	107	620,747,585	538,725,935	26	48,193,530	41	274,827,173					67	274,827,173	62.62	51.01	67	274,827,173	62.62	44.27	Sekretariat
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	133,855,785	2	133,855,785	285,310,387	0	19,498,500	1	65,511,001					1	65,511,001	50.00	22.96	1	65,511,001	50.00	48.94	Sekretariat

Hasil Evaluasi Renja terhadap Capaian Kinerja hingga Triwulan II Tahun 2023 menunjukkan 2 (dua) Program yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang mengalami kinerja yang rendah. Adapun factor yang menghambat dalam capaian kinerja yang rendah tersebut antara lain:

1. Tidak terserapnya anggaran belanja yang sifatnya operasional. Sebagai usulan tindak lanjut, para PA dan PPTK perlu menganalisis ulang konsep pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan mereformulasi koding belanja. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:
 - Akselerasi penyerapan anggaran;
 - Pergeseran anggaran;
 - Melaksanakan efisiensi anggaran yang sekranya tidak dapat diserap.
2. Belum optimalnya pengumpulan data kinerja keuangan yang telah dilaksanakan. Sebagai usulan tindak lanjut, perlu dilakukan percepatan pengumpulan data kinerja keuangan. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan pembinaan dan rekonsiliasi internal dengan para pengelola keuangan sebagai langkah antisipatif belum optimalnya pengumpulan data kinerja keuangan.
3. Terdapat keterlambatan dalam SPJ yang disebabkan oleh belum lengkapnya dokumen-dokumen pendukung SPJ. Sebagai usulan tindak lanjut, perlu adanya pembinaan dan pengendalian kepada para pengelola keuangan. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan pemenuhan dokumen pendukung SPJ secara lengkap dan cepat untuk kemudian para PPTK mencermati dokumen SPJ kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Triwulan II Tahun 2023, maka perlu dilakukan percepatan untuk mencapai target Renja pada Tahun 2023. Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan hingga triwulan II Tahun 2023 diperoleh rata-rata capaian program/kegiatan DISPUSIPDA sebesar 48,00% sehingga perlu menjadi perhatian untuk mengakselerasi pelaksanaan kegiatan.

2.2. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah, yang selanjutnya menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan perpustakaan dan urusan kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar merupakan urusan yang diserahkan kepada Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan ini Dispusipda Provinsi Jawa Barat memiliki kedudukan sebagai Dinas Daerah yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah.

Dispusipda Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya agar berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak- pihak lainnya yang memerlukan pelayanan perpustakaan maupun pelayanan kearsipan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat 2020 s.d. 2022 dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks Membaca Masyarakat		64 Poin	69 Poin	62 Poin	63 Poin	64 Poin	61,49 Poin	61,49 Poin	63 Poin	64 Poin	Dengan layanan inovasi layanan Perpustakaan (CANDIL dan KOLECER) diharapkan target diharapkan dapat terpenuhi
2.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca		72 Poin	69 Poin	69 Poin	71 Poin	72 Poin	61,49 Poin	65,34 Poin	71 Poin	72 Poin	Dengan layanan inovasi layanan Perpustakaan (CANDIL dan KOLECER) diharapkan target diharapkan dapat terpenuhi
3.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara tertib		60%	59%	30%	45%	60%	11%	57,89%	45%	60%	Dengan layanan inovasi layanan Perpustakaan (SIMANIS JUARA/SIDE BAR) diharapkan target diharapkan dapat terpenuhi
4.	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal		A	CC	B	BB	A	N/A	B	BB	A	Dengan layanan inovasi layanan Perpustakaan (SIMANIS JUARA/SIDE BAR) diharapkan target diharapkan dapat terpenuhi
5.	Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis		88%	34%	48%	68%	88%	3%	48%	68%	88%	Dengan layanan inovasi layanan Perpustakaan (SIMANIS JUARA/SIDE BAR) diharapkan target diharapkan dapat terpenuhi
6.	Persentase Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis		65%	35%	35%	50%	65%	66%	35%	50%	65%	Dengan layanan inovasi layanan Perpustakaan (SIMANIS JUARA/SIDE BAR) diharapkan target diharapkan dapat terpenuhi

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispusipda Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanannya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dispusipda Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan dan peluang ditinjau dari faktor internal dan eksternal.

Faktor internal meliputi :

A. Kekuatan

1. Struktur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah provinsi, maka kedudukan Dispusipda sebagai Dinas Teknis daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sama kedudukannya dengan dinas teknis daerah lainnya.

2. Cakupan Tupoksi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan meliputi Perpustakaan Deposit Dan Pengembangan Bahan Perpustakaan, Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca, Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan, Pengelolaan Arsip Dinamis serta Pengelolaan Arsip Statis yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Maka cakupan tupoksi Dispusipda Provinsi Jawa Barat meliputi urusan perpustakaan terdiri dari perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, perpustakaan sekolah/madrasah untuk melayani siswa dan siswi di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, badan usaha milik daerah, lembaga masyarakat, instansi, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya.

Urusan kearsipan mencakup seluruh pencipta arsip yaitu perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah, perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

3. Kompetensi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki cukup baik.

Dispusipda memiliki sumber daya manusia yang baik dan terlatih terdiri dari pejabat struktural dengan jenjang pendidikan setingkat S2-S3, pejabat fungsional pustakawan dan arsiparis yang professional, berpengalaman, karena keberadaan pejabat fungsional pustakawan dan arsiparis.

4. Cakupan Wilayah Kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan perpustakaan dan kearsipan merupakan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Dengan demikian urusan perpustakaan dan kearsipan diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga perpustakaan dan kearsipan yang dibentuk sebagai dinas daerah provinsi, dan diselenggarakan juga oleh pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk dinas daerah kabupaten/kota, termasuk pemerintahan desa yang berada di wilayah kabupaten/kota.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan ke kabupaten/kota sesuai dengan delegasi atau mandat dari pemerintah pusat.

5. Fasilitas Pelayanan Kinerja.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan, Daerah sudah memiliki sarana pelayanan kinerja meliputi;

Perpustakaan;

1. Gedung perpustakaan umum daerah provinsi Jawa Barat sebagai pusat sistem layanan perpustakaan berbasis TIK;
2. Layanan perpustakaan deposit koleksi Jawa Barat;
3. Mobil Perpustakaan keliling;
4. Motor baca;
5. Pusat kegiatan literasi masyarakat;
6. Koleksi Perpustakaan.
7. Pameran perpustakaan

Kearsipan:

1. Gedung depo arsip sebagai pusat penyimpanan arsip retensi 10 tahun milik pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Ruang Preservasi Arsip;
3. Mobil Perlindungan dan Penyelamatan arsip atau *mobil rescue arsip*;

4. Layanan perbaikan arsip yang rusak;
5. Mobil Sadar Arsip.
6. Publikasi kearsipan
7. Pelayanan arsip untuk masyarakat
8. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Simanis Juara

B. Kelemahan

1. Meskipun secara kualitas, SDM Perpustakaan dan Kearsipan sudah dapat diandalkan, tetapi secara kuantitas (jumlah) masih kurang mengingat cakupan wilayah kerjanya dan bobot berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan.
2. Untuk menyelenggarakan perpustakaan daerah sebagai perpustakaan deposit terutama untuk penyimpanan koleksi karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan oleh atau tidak diterbitkan oleh lembaga maupun diluar lembaga pemerintah, swasta, perorangan maupun kelompok, termasuk pelestarian koleksi perpustakaan Jawa Barat, sampai saat ini, Dispusipda belum memiliki Gedung khusus untuk Perpustakaan Deposit;
3. Tingkat ketersediaan records center pada perangkat daerah selaku pencipta arsip belum merata dan belum berstandar.
4. Tingkat ketersediaan perpustakaan masih kurang.
5. Mutu ketersediaan arsip yang autentik belum dilengkapi dengan daftar arsip sesuai standard.

C. Peluang

1. Bidang perpustakaan sesuai dengan Rancangan Rencana RPJMN 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa barat Tahun 2018-2023 berperan strategis untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, trampil dan berkarakter. Berkaitan dengan peran strategis perpustakaan tersebut, pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air. Tingkat ketersediaan perpustakaan untuk semua jenis perpustakaan di Jawa Barat masih dibutuhkan sebagai peluang dalam penyelenggaraan perpustakaan. Berdasarkan kondisi kependudukan yang akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030, perpustakaan memiliki prospek yang sangat menggembirakan untuk dikembangkan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Bidang Kearsipan sesuai dengan Rancangan Rencana RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 berperan strategis untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Berkaitan dengan reformasi birokrasi, salah satu area perubahannya

yaitu penguatan ketatalaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah, melalui pencapaian target-target yaitu meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di instansi pemerintah, kualitas pengelolaan arsip menjadi baik yang diukur melalui indeks pengawasan kearsipan sesuai Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan. Kearsipan dan museum secara simetris memiliki kesamaan fungsional antara arsip dan artefak yang ada di museum yaitu mengandung informasi tentang bukti atau bahan evidence tentang peristiwa, kejadian yang memiliki nilai informasi kesejarahan maka semestinya diselamatkan. Dan sejarah yang benar dan lengkap sangat penting dalam membangun kebudayaan dan peradaban suatu bangsa.

3. Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara *stakeholder* sudah berjalan sangat baik dan terus untuk ditingkatkan.

D. Ancaman

1. Pengelolaan arsip pada masing-masing perangkat daerah masih belum semua dilaksanakan oleh para pejabat fungsional arsiparis atau pelaksana teknis kearsipan yang bersertifikat menyebabkan kualitas hasil kerja belum optimal dan belum dapat dijamin mutunya.
2. Kebijakan atau politik anggaran dalam perencanaan dan penganggaran perpustakaan dan kearsipan yang belum stabil mendukung urusan perpustakaan dan kearsipan.
3. Kelalaian pengelolaan arsip sebagai alat bukti serta sumber sejarah menyebabkan kehilangan arsip autentiknya.
4. Manajemen resiko bencana terhadap arsip dan bahan perpustakaan belum diperhatikan.
5. Masih ditemukan para pemustaka yang memiliki perilaku kurang baik/buruk dengan mengambil buku yang dipinjam yang menyebabkan koleksi buku sebagai aset hilang.

E. Tantangan

Untuk tahun yang direncanakan, isu-isu penting yang dapat dijadikan rekomendasi untuk ditindak lanjut adalah:

1. Keberadaan Lembaga Perpustakaan belum dipandang sebagai pendukung utama peningkatan pendidikan dan Lembaga kearsipan belum dipandang sebagai sumber referensi, informasi dan penelitian.
2. Membaca belum menjadi budaya masyarakat.
3. Usaha ketersediaan tenaga pengelola dan penambahan koleksi buku maupun khasanah arsip belum optimal.

4. Dukungan terhadap keberadaan Perpustakaan Lembaga swadaya masih terbatas tenaga fungsional pustakawan di Sebagian besar Lembaga Perpustakaan belum difasilitasi sebagai tenaga profesi.
5. Kemampuan SDM dalam pelayanan prima perpustakaan dan kearsipan belum terpenuhi.
6. Sarana dan prasarana depo arsip sudah tidak memadai lagi untuk menampung pertumbuhan arsip.
7. Adanya Pandemi virus COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia melumpuhkan banyak segi kehidupan merupakan tantangan bagi Dispusipda untuk dapat memberikan layanan Perpustakaan dan Kearsipan yang sesuai dengan protokol Kesehatan.

F. Formulasi Isu isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Untuk tahun yang direncanakan, isu isu penting yang dapat dijadikan rekomendasi untuk ditindak lanjuti adalah:

- a. Pemerataan ketersediaan fasilitas membaca di ruang publik
- b. Peningkatan layanan perpustakaan bergerak (*mobile library*) untuk menjangkau pusatkegiatan masyarakat sampai ke pelosok desa.
- c. Pemberdayaan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melaluiperpustakaan bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi social.
- d. Transformasi perpustakaan menjadi perpustakaan digital (*digital library*).
- e. Perlu terus meningkatkan jumlah bahan pustaka/buku untuk didistribusikan kepadaperpustakaan-perpustakaan ditingkat provinsi sampai dengan tingkat pedesaan
- f. Penguasaan TIK oleh para pejabat fungsional pustakawan maupun pejabat fungsionalarsiparis.
- g. Peningkatan mutu ketersediaan arsip yang autentik yang dilengkapi daftar arsip.
- h. Transformasi arsip konvensional menjadi arsip digital atau e-arsip.
- i. Penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai kesejarahan secara efektif.

Faktor eksternal meliputi :

A. Keluarga

Struktur sosial merupakan suatu hubungan antara individu dengan orang lain (masyarakat) untuk membentuk suatu norma, nilai, atau peraturan yang ada dalam suatu masyarakat sesuai dengan kepentingan bersama. Salah satu unsurnya adalah keluarga yaitu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu

tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Program Pembinaan Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca memiliki target diantaranya keluarga, karena untuk membangun minat dan kebiasaan membaca individu sangat besar pengaruhnya dari suatu keluarga. Oleh karena itu dengan adanya perpustakaan keluarga akan mampu membentuk insan yang memiliki budi pekerti, akhlak, kecerdasan yang baik

B. Komunitas

Komunitas adalah suatu kelompok sosial disuatu masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu dan umumnya ikatan emosional, ketertarikan dan kebiasaan yang sama. Salah satu komunitas yang berkembang cukup baik di masyarakat yaitu komunitas bidang perpustakaan, yang merupakan himpunan dari berbagai jenis perpustakaan dan perorangan yang mempunyai minat, perhatian, dan kepedulian pada perkembangan perpustakaan. Dengan demikian komunitas perpustakaan dapat menjadi ujung tombak terhadap pemberdayaan perpustakaan.

C. Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan non formal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan. Pemberdayaan satuan pendidikan secara umum menjadi kewajiban pemerintah melalui kementerian pendidikan, dan atau dinas pendidikan pada pemerintahan daerah. Dan keberadaan perpustakaan pada setiap satuan pendidikan menjadi suatu unsur penting pada setiap penyelenggaraan satuan pendidikan.

D. Peraturan perundang-undangan tentang alat bukti

Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah dipengadilan pidana terbagi menjadi :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dengan demikian surat atau arsip/dokumen sebagai bagian dari alat bukti hukum sah, maka ketersediaan arsip yang autentik merupakan tujuan yang harus dapat dicapai dalam penyelenggaraan kearsipan.

Berdasarkan pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 5 alat bukti dalam perkara perdata yaitu;

1. Surat
2. Saksi

3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Dengan demikian surat atau arsip/dokumen sebagai bagian dari alat bukti hukum sah, maka ketersediaan arsip yang autentik merupakan tujuan yang harus dicapai dalam penyelenggaraan kearsipan.

E. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance & Clean Governace*) sudah menjadi agenda kerja pemerintah serta tercantum pada Rencana Jangka Menengah Daerah 2018 s.d. 2023. Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel sangat diperlukan arsip/dokumen yang berfungsi sebagai evidence kinerja yang dapat diandalkan.

F. Kebudayaan

Kebudayaan dapat berfungsi sebagai identitas, jati diri, karakter suatu bangsa, sedangkan identitas, jati diri, karakter suatu bangsa dengan arsip memiliki hubungan yang bersifat simetris artinya sisi objek arsip dengan sisi objek identitas, jati diri, karkater suatu bangsa terdapat hubungan integral yang sama, seimbang dalam kerangka kerja (*frame work*) pembangunan kebudayaan.

2.4. Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2023

Penelaahan terhadap Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang tercantum di dalam Perubahan RKPD 2023;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan DISPUSIPDA berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan DISPUSIPDA yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Melakukan pengecekan program/kegiatan DISPUSIPDA yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas Perangkat Daerah sudah termuat dalam RKPD. Jika belum termuat, maka perlu membuat catatan penting;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan DISPUSIPDA yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai;

6. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan DISPUSIPDA hasil review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
7. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap 5 (lima) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran menjadi Rp. 54.798.043.243 yang tercantum pada perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Terdapat 7 kegiatan yang bertambah pagu anggaran dari pergeseran pagu anggaran akibat penyesuaian output kegiatan serta sisa hasil tender pengadaan unit KOLECER dan Pembangunan Galery Covid 19;
2. Jumlah sub kegiatan dan anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan terdapat perbedaan adanya penambahan sub kegiatan pengadaan mebeler untuk keperluan pelayanan (tercantum dalam Tabel 2.3).

Tabel 2.3
Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2023

Kode Rekening	RKPD 2023		Hasil Analisis Kebutuhan 2023		Ket.
	Kegiatan	Anggaran Murni	Pergeseran	Perubahan	
1	2	3	4	5	6
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54.076.926.416	54.076.926.416	51.771.762.847	
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.771.606	250.771.606	265.763.856	
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.696.018.308	40.696.018.308	38.487.318.920	
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.515.961.833	1.515.961.833	1.813.571.436	
2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.016.620.240	4.016.620.240	3.359.431.312	
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.464.911.628	6.464.911.628	6.576.901.570	
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.102.642.801	1.102.642.801	1.238.775.753	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.106.472.048	2.106.472.048	2.117.180.348	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	1.928.842.123	1.928.842.123	1.891.950.523	
2.23.02.1.01	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	177.629.925	177.629.925	225.229.825	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	85.683.000	85.683.000	85.683.000	
2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	11.423.000	11.423.000	11.423.000	
2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	15.040.000	15.040.000	15.040.000	
2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provins	44.200.000	44.200.000	44.200.000	

2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	15.020.000	15.020.000	15.020.000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	677.232.348	677.232.348	823.417.048	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	372.353.248	372.353.248	702.297.348	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provins	204.879.100	204.879.100	387.353.248	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	121.119.700	121.119.700	121.119.700	
2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	121.119.700	121.119.700	121.119.700	

Sumber : Perubahan RKPD 2023

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISPUSIPDA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keberhasilan pencapaian sebuah tujuan membutuhkan sinergi termasuk sinergi program pengembangan perpustakaan dan kearsipan antara Pusat/Nasional dan daerah. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat berperan penting dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa (pasal 2 dan 3). Sementara itu, pembangunan perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (pasal 4).

Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2016-2025 adalah “Terdepan dalam informasi Pustaka, menuju Indonesia gemar membaca.” Sedangkan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016-2025 sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan koleksi nasional berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam sebagai warisan intelektual bangsa;
- 2) Mengembangkan layanan nasional berbasis Pustaka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- 3) Mengembangkan infrastruktur perpustakaan melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta mutu dan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan.

Untuk mencapai hal tersebut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai Pusat Sumber Belajar Masyarakat, melalui :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan semua jenis perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat yang demokratis, bebas biaya dan mudah dijangkau pada setiap strata masyarakat.
 - b. Kemitraan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
 - c. Peningkatan efektivitas manajemen pembangunan perpustakaan.
- 2) Revitalisasi perpustakaan, melalui :
- a. Pengembangan layanan jasa perpustakaan dan informasi termasuk diversifikasi layanan berbasis teknologi melalui pengembangan jejaring nasional *e-library* dan layanan mobil serta kapal perpustakaan keliling.
 - b. Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca di pusat provinsi, kabupaten/kota dan desa;
- 3) Peningkatan Ketersediaan Layanan Perpustakaan Secara Merata, melalui :
- a. Pengembangan jumlah koleksi berbasis Pustaka pada semua strata masyarakat;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan Nasional.
- 4) Peningkatan Kualitas dan Keberagaman Koleksi Perpustakaan, melalui :
- a. Peningkatan pengelolaan koleksi nasional berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam terbitan nasional dan internasional mengenai Indonesia, sebagai *memory of nation*.
 - b. Pengembangan koleksi Perpustakaan Nasional.
 - c. Pengembangan koleksi nasional, preservasi, dan konservasi bahan Pustaka dan naskah kuno.
 - d. Kemitraan perpustakaan dengan penerbit, pengarang, Lembaga/instansi pemerintah dan swasta serta perguruan tinggi;
- 5) Peningkatan Promosi Gemar Membaca dan Pemanfaatan Perpustakaan, melalui :
- a. Kampanye, workshop/seminar, penyuluhan gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan.
 - b. Promosi perpustakaan dan gemar membaca melalui media cetak dan elektronik.
- 6) Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas Tenaga Perpustakaan yang meliputi Pustakawan, Tenaga Teknis dan Tenaga Ahli :
- a. Pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi.
 - b. Peningkatan akuntabilitas kinerja.

Kemudian, dalam bidang kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Lembaga yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang kearsipan turut berperan aktif dan mendukung terwujudnya agenda pembangunan yaitu menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis dengan focus pada penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Visi Arsip Nasional RI Tahun 2016-2025 adalah “Arsip Sebagai Simpul Pemersatu Bangsa”. Visi ini mengandung maksud bahwa arsip merupakan bukti dari dinamika perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya, dan harkat serta terwujudnya wawasan kebangsaan yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun meliputi sebagai berikut :

- 1) Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
- 2) Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
- 3) Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
- 4) Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- 5) Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Sasaran Strategis untuk tahun 2016-2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pengelolaan arsip yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan Lembaga aparatur negara;
- 2) Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan Lembaga aparatur negara;
- 3) Mewujudkan usaha penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dispusipda Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, telah dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran Renja Dispusipda 2023 sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Meningkatnya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi masyarakat;
2. Meningkatnya ketersediaan, penyelamatan, dan perlindungan arsip

B. Sasaran

1. Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Membaca, Meningkatnya ketersediaan fasilitas, pemanfaatan, dan kebiasaan membaca.
2. Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat.
3. Meningkatnya pengelolaan arsip perangkat daerah yang tertib.
4. Meningkatnya Ketersediaan Sumber arsip Kesejarahan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan DISPUSIPDA tahun 2023

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) DISPUSIPDA Tahun 2023 merupakan langkah tindak lanjut atas ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Dengan disusunnya Perubahan Renja tersebut, diharapkan dapat mendukung capaian kinerja pembangunan daerah serta implementasi 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Jawa Barat secara optimal yang selanjutnya diterjemahkan kedalam sasaran Prioritas Pembangunan melalui pelaksanaan Program Pembangunan.

DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Gubernur. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2023 serta memperhatikan Perubahan RKPD Tahun 2023 maka terdapat 7 kegiatan yang bertambah pagu anggaran dari pergeseran pagu anggaran akibat penyesuaian output kegiatan serta sisa hasil tender pengadaan unit KOLECER dan Pembangunan Galery Covid 19 sebagaimana hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan agar output dan outcome kegiatan dapat tercapai dengan optimal oleh DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 dengan total kebutuhan dana sebesar Rp. 54.798.043.243,00 seperti disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat pada Perubahan RKPD tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Nama Program	Kegiatan	Subkeg	Lokasi	RKPD tahun 2023		RKPD Perubahan Tahun 2023		Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju 2024	Catatan Penting
				Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikator Kinerja	Target Capaian					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	14 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	14 Dokumen	250,771,606	265.763.856	14.992.250	350.771.607	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bandung	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	142 Orang	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	142 Orang	40,596,019,308	38,377,319,920	(2.218.699.388)	36.595.215.969	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bandung	Laporan Keuangan	16 Dokumen	Laporan Keuangan	16 Dokumen	99,999,000	109.999.000	10.000.000	99.999.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bandung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	30,000,000	30,000,000	-	60.000.000	
				Pendaftaran Kepesertaan	12 Bulan	Pendaftaran Kepesertaan	12 Bulan					
				Uang Harian Diklat	12 Bulan	Uang Harian Diklat	12 Bulan					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bandung	Alat-alat Listrik dan Penerangan	2 Paket	Alat-alat Listrik dan Penerangan	2 Paket	145,695,230	145,695,230	-	161.807.790	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandung	Alat Bahan Komputer	1 Paket	Alat Bahan Komputer	1 Paket	320,050,800	439,461,066	119.410.266	369.791.400	
				Alat Kebersihan	2 Paket	Alat Kebersihan	2 Paket					
				Alat Tulis Kantor	2 Paket	Alat Tulis Kantor	2 Paket					
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket					
				Karangan Bunga	12 Bulan	Karangan Bunga	12 Bulan					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bandung	Barang Cetak	2 Paket	Barang Cetak	2 Paket	111,686,083	151,057,140	39.371.057	135.316.500	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket					
				Penjilidan	35 Dokumen	Penjilidan	35 Dokumen					
				Publikasi dan Dokumentasi	3 Paket	Publikasi dan Dokumentasi	3 Paket					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bandung	Langganan Surat Kabar/Majalah	12 Bulan	Langganan Surat Kabar/Majalah	12 Bulan	37,800,000	37,800,000	-	37.800.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandung	Air Mineral	12 Bulan	Air Mineral	12 Bulan	900,729,720	1.039.558.000	138.828.280	1.078.838.200	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan					
			Makanan dan Minuman untuk Rapat	12 Bulan	Makanan dan Minuman untuk Rapat	12 Bulan						
			Makanan dan Minuman untuk Tamu	12 Bulan	Makanan dan Minuman untuk Tamu	12 Bulan						
			Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	48 Orang	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	48 Orang						
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 Bulan	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 Bulan						
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan	Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan						
	Pengadaan Mebel		Bandung			Sofa	1 Set	-	67.852.010	67.852.010	100,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1,118,000,180	2.305.284.123	1.187.283.943	1.115.661.569	

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Komputer All In One	4 Unit	Komputer All In One	4 Unit					
			Kotak Literasi Cerdas	77 Unit	Kotak Literasi Cerdas	77 Unit					
			Printer	6 Unit	Printer	6 Unit					
			Scanner ADF	6 Unit	Scanner ADF	6 Unit					
			SSD	30 Unit	SSD	30 Unit					
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bandung	Diorama Covid-19	1 Gedung	Diorama Covid-19	1 Gedung	2,898,620,060	986.295.179	(1.912.324.881)	500,000,000	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bandung	Langganan Aplikasi	12 Bulan	Langganan Aplikasi	12 Bulan	1,089,905,600	896.967.800	(192.937.800)	1.149.932.600	
			Langganan Listrik	12 Bulan	Langganan Listrik	12 Bulan					
			Langganan Telepon	12 Bulan	Langganan Telepon	12 Bulan					

Nama Program	Kegiatan	Subkeg	Lokasi	RKPD tahun 2023		RKPD Perubahan Tahun 2023		Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju 2024	Catatan Penting						
				Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikator Kinerja	Target Capaian											
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bandung	Jasa Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara	3 Kegiatan	Jasa Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara	3 Kegiatan	5,375,006,028	5.679.933.770	304.927.742	5.240.353.764								
			Jasa Pengolahan Sampah	12 Bulan	Jasa Pengolahan Sampah	12 Bulan												
			Jasa Rohaniwan	44 Kali	Jasa Rohaniwan	44 Kali												
			Jasa Tenaga Ahli	1 Kegiatan	Jasa Tenaga Ahli	1 Kegiatan												
			Jasa Tenaga Keamanan	17 Orang	Jasa Tenaga Keamanan	17 Orang												
			Jasa Tenaga Kebersihan	27 Orang	Jasa Tenaga Kebersihan	27 Orang												
			Jasa Tenaga Pengemudi	2 Orang	Jasa Tenaga Pengemudi	2 Orang												
			Jasa Tenaga Teknis Kegiatan	38 Orang	Jasa Tenaga Teknis Kegiatan	38 Orang												
			Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	12 Bulan	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	12 Bulan												
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bandung	Bahan Bakar Minyak	46 Unit						Bahan Bakar Minyak	46 Unit	348,039,431	414.739.431	66.700.000	454.199.431	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit												
	KIR Kendaraan Dinas Layanan Perpustakaan dan Kearsipan	9 Unit			KIR Kendaraan Dinas Layanan Perpustakaan dan Kearsipan	9 Unit												
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	20 Unit			Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	20 Unit												
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	26 Unit			Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	26 Unit												
	Service Kendaraan Operasional Roda 2 (dua)	20 Unit			Service Kendaraan Operasional Roda 2 (dua)	20 Unit												
	Service Kendaraan Operasional Roda 4 (empat)	26 Unit			Service Kendaraan Operasional Roda 4 (empat)	26 Unit												
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandung			Fumigasi Arsip dan Buku	1 Kali	Fumigasi Arsip dan Buku	1 Kali	620,747,585	538.725.935	(82.021.650)	625.955.327						
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit										
					Pemeliharaan AC	50 Unit	Pemeliharaan AC	50 Unit										
			Pemeliharaan Eskalator	3 Unit	Pemeliharaan Eskalator	3 Unit												
			Pemeliharaan Genset	3 Unit	Pemeliharaan Genset	3 Unit												
			Pemeliharaan Jaringan Listrik	1 Kali	Pemeliharaan Jaringan Listrik	1 Kali												
			Pemeliharaan Komputer	40 Unit	Pemeliharaan Komputer	40 Unit												
			Pemeliharaan Lift	4 Unit	Pemeliharaan Lift	4 Unit												
			Pemeliharaan Peralatan Kantor	12 Bulan	Pemeliharaan Peralatan Kantor	12 Bulan												
			Pengendalian Hama	12 Bulan	Pengendalian Hama	12 Bulan												
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	133,855,785	285.310.387	188.385.450	151.454.602								
			Pemeliharaan Gedung	5 Paket	Pemeliharaan Gedung	5 Paket												
			Pemeliharaan Taman	12 Bulan	Pemeliharaan Taman	12 Bulan												
			Perbaikan Fasilitas Gedung	1 Paket	Perbaikan Fasilitas Gedung	1 Paket												
PROGRAM PEMBINAAN AAN PERPUSTAKAAN			Bandung	Layanan Perpustakaan	20 Kali	Layanan Perpustakaan						20 Kali	250.993.000	260.990.400	9.997.400	250.993.000		
				Keliling Area Publik Layanan Terpadu	48 Titik	Keliling Area Publik Layanan Terpadu						48 Titik						
				Pameran	4 Kali	Pameran						4 Kali						
				Pendataan Perpustakaan Keliling	27 Kab/Kota	Pendataan Perpustakaan Keliling						27 Kab/Kota						
				Peningkatan Kompetensi	1 Kali	Peningkatan Kompetensi						1 Kali						
				Workshop Perpustakaan Berbasis Bahan Perpustakaan	48 Kali	Workshop Perpustakaan Berbasis Bahan Perpustakaan						48 Kali						
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan	Bandung		Bimtek pengelolaan Perpustakaan	140 Orang	Bimtek pengelolaan Perpustakaan	140 Orang	147.434.475	150.134.025	2.699.550	147.434.475							
				Kajian Pembudayaan kegemaran membaca	1 Dokumen	Kajian Pembudayaan kegemaran membaca	1 Dokumen											

		Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		Pra Akreditasi bagi Lembaga perpustakaan Tingkat SMA sederajat dan perpustakaan pendidikan khusus di Jawa Barat	200 Lembaga	Pra Akreditasi bagi Lembaga perpustakaan Tingkat SMA sederajat dan perpustakaan pendidikan khusus di Jawa Barat	200 Lembaga				
		Pengembangan Perpustakaan Deposit	Bandung	Center Of Excellent (telaah Pustaka)	1 Kali	Center Of Excellent (telaah Pustaka)	1 Kali	12.228.000	12.228.000		12.228.000
				Buku/Bahan Perpustakaan Digital Koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat (CANDIL)	374 Judul	Buku/Bahan Perpustakaan Digital Koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat (CANDIL)	374 Judul				
				Buku/Bahan Perpustakaan Digital Koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat (CANDIL)	748 Eksemplar	Buku/Bahan Perpustakaan Digital Koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat (CANDIL)	748 Eksemplar				

Nama Program	Kegiatan	Subkeg	Lokasi	RKPD tahun 2023		RKPD Perubahan Tahun 2023		Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju 2024	Catatan Penting
				Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikator Kinerja	Target Capaian					
				Buku/Bahan Perpustakaan Koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat (KOLECER)	400 Judul	Buku/Bahan Perpustakaan (KOLECER)	400 Judul					
				Buku/Bahan Perpustakaan Koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat (KOLECER)	800 Eksemplar	Buku/Bahan Perpustakaan (KOLECER)	800 Eksemplar					
				Buku/Bahan Perpustakaan Koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat	125 Judul	Buku/Bahan Perpustakaan	125 Judul					
				Buku/Bahan Perpustakaan Koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat	500 Eksemplar	Buku/Bahan Perpustakaan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat	500 Eksemplar					
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Bandung	Aktualisasi Literasi /Festival Literasi	500 orang	Aktualisasi Literasi /Festival Literasi	500 orang	104.129.975	154.429.875	50.299.900	104.129.975	
Pengembangan Organisasi Masyarakat Perpustakaan				1 Lembaga	Pengembangan Organisasi Masyarakat Perpustakaan	1 Lembaga						
Workshop Pembudayaan Kegemaran Membaca				200 Orang	Workshop Pembudayaan Kegemaran Membaca	200 Orang						
		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Bandung	Pemilihan duta baca tingkat provinsi jawa barat	27 Kab./Kota	Pemilihan duta baca tingkat provinsi jawabarat	27 Kab./Kota	70.799,950	70.799.950	-	73.499.950	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSINASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Bandung	Buku/Bahan Perpustakaan hasil implementasi KCKR	4500 Judul	Buku/Bahan Perpustakaan animplementasi KCKR	4500 Judul	11.423.000	11.423.000	-	11.423.000	
	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Penerbitan Bibliografi Daerah	Bandung	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	Jumlah Bibliografi Daerah y an Diterbitk an	1 Naskah	15.040.000	15.040.000	-	15.040.000	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Bandung	Hasil pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	2 Naskah	Hasil pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	2 Naskah	44.200.000	44.200.000	-	44.200.000	
				Naskah kuno hasil terjemahan	2 Naskah	Naskah kuno hasil terjemahan	2 Naskah					
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Bandung	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	25 Judul	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	25 Judul	15.020.000	15.020.000	-	15.020.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Penciptaan dan Penggunaan Arsip	Bandung	Bimtek Pengelolaan Arsip	225 Orang	Bimtek Pengelolaan Arsip	225 Orang	233.849.248	239.648.848	5.799.600	233.849.248	
				Pembinaan Kearsipan ke Kabupaten/Kota	40 Lokasi	Pembinaan Kearsipan ke Kabupaten/Kota	40 Lokasi					
				Pembinaan Kearsipan ke Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	Pembinaan Kearsipan ke Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah					
		Rapat Penyelenggaraan Kearsipan Perangkat daerah	150 Orang	Rapat Penyelenggaraan Kearsipan Perangkat daerah	150 Orang							
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Bandung	Boks Arsip	6000 Buah	Boks Arsip	6000 Buah					
Penataan Arsip Inaktif Pemerintah Provinsi Jawa Barat	484 Boks	Penataan Arsip Inaktif Pemerintah Provinsi Jawa Barat		484 Boks								
Robotik Procsesing Automatio				1 Paket	Robotik Procsesing Automatio	1 Paket						

Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Bandung	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	10 Daftar	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	10 Daftar	204.879.100	214.944.100	10.065.000	204.879.100	
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Bandung	Bimtek SIKN JIKN	1 Kali	Bimtek SIKN JIKN	1 Kali	38.521.000	38.521.000	-	38.521.000	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Bandung	Gelar Infoemasi kearsipan	30 Kali	Gelar Infoemasi kearsipan	30 Kali	61.479.000	61.479.000	-	61.479.000	

Nama Program	Kegiatan	Subkeg	Lokasi	RKPD tahun 2023		RKPD Perubahan Tahun 2023		Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju2024	Catatan Penting
				Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikator Kinerja	Target Capaian					
PROGRAM PERLINDUNGAN DANPENYELAMATAN ARSIP	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Bandung	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Daftar	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih MediaSesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Daftar	121.119.700	121.119.700	-	121.119.700	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Renstra Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Tahun 2023 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 pada unit kerja di Dispusipda Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan selama 1 (satu) tahun. Guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek pada Tahun 2023.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur di lingkungan Dispusipda Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 secara efektif dan efisien;
2. Rencana kerja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2023, dimana Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Tata cara penyusunan Renja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Rencana Kerja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi,

Oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang tinggi serta langkah-langkah nyata dari seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dispusipda Provinsi Jawa Barat dalam rangka merealisasikan rencana-rencana yang sudah tertuang dalam bentuk dokumen Perubahan rencana kerja (Renja) tersebut agar dapat dilaksanakan secara optimal.

Dengan adanya perencanaan kinerja yang baik, tentu akan meningkatkan motivasi kerjaseluruh pegawai, dan dapat mendorong terjadinya suatu peningkatan target dan realisasikinerja program dan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.

Bandung, 13 September 2023

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Dra. Hj. I GUSTI AGUNG KIM FAJAR WIYATI OKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196804041988032014